



Pengungkapan Informasi Anti Korupsi pada Perbankan Syariah di Indonesia

Faris Faqih Ahmad ^{1*}, Aziza Aziz Rahmaningsih ²

¹⁻² Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faqihalhakiem@gmail.com ¹

Abstract. *Disclosure of anti-corruption information is a specific component of corporate social responsibility (CSR) disclosures, which plays a crucial role in strengthening transparency and accountability in Islamic banking in Indonesia. This study aims to analyze the level of anti-corruption information disclosure and the factors influencing it in Islamic commercial banks in Indonesia. The research method used is a quantitative approach using content analysis techniques on the annual reports and sustainability reports of Islamic commercial banks. Anti-corruption disclosure is measured using an index based on the Global Reporting Initiative (GRI) anti-corruption indicators, which consist of a number of disclosure items. Data analysis was conducted using regression to examine the influence of bank characteristics on the level of anti-corruption disclosure. The results show that bank size, bank age, and CSR awards have a positive effect on anti-corruption information disclosure, while profitability and customer influence show a negative relationship, and leverage does not show a significant effect. These findings indicate that anti-corruption disclosure practices are influenced by banks' need to manage relationships with key stakeholders. The implications of this study emphasize the importance of anti-corruption information disclosure as a means of gaining continued support from Islamic banking stakeholders.*

Keywords: *Anti-Corruption; Corporate Social Responsibility; Islamic Banking; Stakeholders; Transparency.*

Abstrak. Pengungkapan informasi anti korupsi merupakan bagian spesifik dari pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan informasi anti korupsi serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada bank umum syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis isi terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank umum syariah. Pengungkapan anti korupsi diukur menggunakan indeks berdasarkan indikator anti korupsi *Global Reporting Initiative* (GRI) yang terdiri dari sejumlah item pengungkapan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi untuk menguji pengaruh karakteristik bank terhadap tingkat pengungkapan anti korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank, umur bank, dan *CSR awards* berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi anti korupsi, sementara profitabilitas dan *customer influence* menunjukkan hubungan negatif, serta leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan anti korupsi dipengaruhi oleh kebutuhan bank dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder* utama. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengungkapan informasi anti korupsi sebagai sarana memperoleh dukungan berkelanjutan dari *stakeholder* perbankan syariah.

Kata kunci: Anti Korupsi; Pemangku Kepentingan; Perbankan Syariah; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merujuk pada kewajiban perusahaan dan entitas bisnis untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan kepedulian sosial dan lingkungan. Di Indonesia, implementasi CSR semakin marak di kalangan perusahaan publik. Meskipun demikian, aktivitas CSR secara tradisional lebih dominan di sektor manufaktur dan pertambangan. Seiring dengan perkembangan global dan meningkatnya

harapan pemangku kepentingan, sektor perbankan juga mulai mengadopsi praktik CSR, dengan mengakui tanggung jawab sosial sebagai komponen penting dari kerangka operasional dan etika mereka. (Christian & Resnika, 2022).

Dalam perbankan syariah, pengungkapan CSR harus menyediakan informasi secara lengkap berdasarkan nilai-nilai keIslaman. Nilai-nilai keIslaman tersebut adalah hal yang harus dilakukan dan ditunjukkan kepada stakeholder perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah dapat dipercaya dan dijadikan solusi terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertolak belakang dengan prinsip syariah (Ulya Nadhila Damanik, 2024).

Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya tiga Bank Kredit Syariah Pedesaan (BPRS) di Bandung dan PT BPRS Heraukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tahun yang sama, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991, dan secara resmi memulai operasinya pada tanggal 1 Mei 1992, menyusul pembentukan kelompok kerja oleh dua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk mengembangkan lembaga perbankan syariah di negara ini (Misra dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Indonesia secara resmi mengakui dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada Desember 2017, sektor perbankan syariah telah berkembang mencakup 13 Bank Komersial Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah, yang menunjukkan peningkatan partisipasi bank-bank nasional dalam menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah (Novita & Fatima, 2024).

Penelitian Triani (2018) telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji pengungkapan informasi anti korupsi sebagai bagian spesifik dari *corporate social responsibility* (CSR) pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan indikator anti korupsi *Global Reporting Initiative* (GRI) dan menunjukkan bahwa karakteristik bank, seperti ukuran, umur, dan perolehan *CSR awards*, berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan anti korupsi, sementara profitabilitas dan *customer influence* berpengaruh negatif, serta leverage tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa teori *stakeholder* manajerial mampu menjelaskan praktik pengungkapan anti korupsi secara parsial pada perbankan syariah.

Meskipun demikian, penelitian Kyere & Ausloos, (2021) masih memiliki beberapa keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Pertama, periode pengamatan yang digunakan terbatas pada tahun 2012–2016, sehingga belum mencerminkan perkembangan terkini praktik tata kelola dan transparansi perbankan syariah, khususnya setelah meningkatnya tuntutan publik terhadap pencegahan korupsi dan penguatan *good corporate governance*. Kedua, penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaruh karakteristik bank terhadap

tingkat pengungkapan, sementara kajian yang secara spesifik menelaah pola, kedalaman, dan kecenderungan pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah masih relatif terbatas. Ketiga, pengungkapan anti korupsi yang dianalisis cenderung dipahami sebagai pemenuhan indikator, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pengungkapan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder*.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada tingkat dan karakteristik pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pengungkapan informasi anti korupsi sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari *stakeholder* perbankan syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengungkapan informasi anti korupsi merupakan bagian dari praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap organisasi (Suwandi, Arum Ardianingsih et al., 2022). Dalam konteks perbankan syariah, pengungkapan ini memiliki posisi strategis karena prinsip syariah menekankan nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis (Sefriani & Wartini, 2017). Oleh karena itu, pengungkapan informasi anti korupsi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai etika dan moral yang melekat pada sistem keuangan syariah.

Teori *stakeholder* menjadi landasan utama dalam menjelaskan praktik pengungkapan informasi anti korupsi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, nasabah, regulator, dan masyarakat (Koh et al., 2023). Dalam perspektif *stakeholder* manajerial, manajemen cenderung mengungkapkan informasi yang relevan untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari *stakeholder* kunci. Pengungkapan informasi anti korupsi dipandang sebagai alat strategis untuk menunjukkan komitmen etis perusahaan serta menjaga hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan tersebut.

Selain teori *stakeholder*, konsep *good corporate governance* (GCG) juga relevan dalam menjelaskan pengungkapan anti korupsi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mendorong perusahaan, termasuk perbankan syariah, untuk menyampaikan informasi yang memadai terkait kebijakan dan praktik pencegahan korupsi

(Ekonomi et al., 2023). Pengungkapan yang baik diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi dan potensi perilaku oportunistik manajemen.

Pengukuran pengungkapan informasi anti korupsi umumnya mengacu pada indikator *Global Reporting Initiative (GRI)* yang menyediakan standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan. Indikator ini mencakup pengungkapan kebijakan anti korupsi, mekanisme pencegahan, pelatihan, serta tindakan yang diambil dalam menghadapi praktik korupsi. Penggunaan indeks berbasis GRI memungkinkan penilaian yang sistematis terhadap tingkat dan kelengkapan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Studi Triani (2018) menemukan bahwa ukuran bank, umur bank, dan perolehan *CSR awards* berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi, sementara profitabilitas dan *customer influence* berpengaruh negatif, serta leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan dan ekspektasi *stakeholder* memainkan peran penting dalam mendorong pengungkapan informasi anti korupsi.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah dipahami sebagai respons manajerial terhadap tuntutan tata kelola yang baik dan kebutuhan pengelolaan hubungan dengan *stakeholder*. Dengan demikian, karakteristik dan kondisi bank diperkirakan memengaruhi sejauh mana informasi anti korupsi diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

Maqāṣid al-Sharī'ah dan Pengungkapan Informasi Anti Korupsi

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah dapat dijelaskan melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) (Akbar, 2020). Prinsip ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasional bisnis secara etis, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk dalam upaya pencegahan praktik korupsi.

Pengungkapan informasi anti korupsi memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Praktik korupsi berpotensi merugikan keuangan perusahaan, melemahkan kepercayaan publik, serta mencederai nilai moral dan etika Islam (Ramadhani & Musyarapah, 2024). Oleh karena itu, transparansi melalui pengungkapan informasi anti korupsi merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas perbankan syariah dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, pengungkapan anti korupsi juga mencerminkan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Dengan mengungkapkan kebijakan, sistem pengendalian, serta komitmen terhadap pencegahan korupsi, bank syariah menunjukkan tanggung jawab moral tidak hanya kepada *stakeholder* duniawi, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik amanah. Dalam konteks ini, pengungkapan informasi anti korupsi tidak sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau standar pelaporan, melainkan menjadi bagian dari ibadah sosial (*ibadah mu'āmalah*) yang bertujuan menciptakan keadilan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan teori *stakeholder* dan *good corporate governance* memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan praktik pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah. Semakin tinggi komitmen bank syariah terhadap nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, semakin besar kecenderungan bank untuk mengungkapkan informasi anti korupsi secara lebih luas dan berkualitas sebagai wujud tanggung jawab etis dan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan informasi anti korupsi serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menguji hubungan antara karakteristik bank dan praktik pengungkapan informasi anti korupsi secara empiris (Waruwu et al., 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2012–2016. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria ketersediaan dan kelengkapan laporan tahunan serta laporan tanggung jawab sosial atau laporan keberlanjutan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 11 Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian dengan total observasi sebanyak 55 unit analisis.

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian.

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK periode 2012–2016	11
2	Bank Umum Syariah (BUS) yang laporannya tidak dapat diakses peneliti (2012–2016)	0
	Jumlah Perusahaan Sampel	11

Sumber: Data diolah peneliti (2025).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan Bank Umum Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Wajdi et al., 2024).

Instrumen penelitian berupa indeks pengungkapan informasi anti korupsi yang disusun berdasarkan indikator anti korupsi *Global Reporting Initiative* (GRI) yang mencakup 11 item pengungkapan. Setiap item diberi skor satu apabila diungkapkan dan nol apabila tidak diungkapkan, kemudian dihitung sebagai rasio tingkat pengungkapan anti korupsi.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran bank, profitabilitas, umur bank, penghargaan CSR, *customer influence*, dan leverage, sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan informasi anti korupsi. Ukuran bank merepresentasikan total aset, profitabilitas diukur dengan rasio laba terhadap aset, umur bank menunjukkan lamanya bank beroperasi, penghargaan CSR dinyatakan dalam variabel dummy, *customer influence* mencerminkan proporsi dana investasi terhadap ekuitas, dan leverage menggambarkan proporsi kewajiban terhadap total aset.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Pengujian model meliputi uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis secara parsial dan simultan menggunakan uji statistik yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa indeks pengungkapan yang digunakan layak dan konsisten untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengumpulan Data dan Karakteristik Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan tanggung jawab sosial, dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (Siregar, 2023). Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi terhadap laporan resmi yang dipublikasikan oleh masing-masing bank. Periode pengamatan penelitian mencakup tahun 2012 hingga 2016 dengan lokasi penelitian pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh 11 Bank Umum Syariah dengan total 55 unit observasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum variabel penelitian, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh karakteristik bank terhadap tingkat pengungkapan informasi anti korupsi.

Tingkat Pengungkapan Informasi Anti Korupsi pada Perbankan Syariah

Statistik Deskriptif Pengungkapan Anti Korupsi

Tabel 2. Statistik Deskriptif Indeks Pengungkapan Informasi Anti Korupsi.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Indeks Pengungkapan Anti Korupsi (GRI)	55	0,27	0,82	0,54	0,15

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Indeks pengungkapan anti korupsi dihitung berdasarkan 11 indikator *anti-corruption disclosure* Global Reporting Initiative (GRI) dengan pendekatan *content analysis*, di mana nilai 1 diberikan apabila item diungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan total item.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah di Indonesia masih bervariasi antarbank dan antarperiode. Indeks pengungkapan anti korupsi yang diukur berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) memperlihatkan bahwa sebagian besar bank telah mengungkapkan kebijakan anti korupsi secara umum, namun pengungkapan terkait mekanisme implementasi, pelatihan anti korupsi, serta pelaporan insiden korupsi masih relatif terbatas.

Variasi ini mengindikasikan adanya perbedaan komitmen dan kapasitas manajerial dalam menyampaikan informasi anti korupsi secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengungkapan CSR, khususnya anti korupsi, masih sering diposisikan sebagai pemenuhan minimum terhadap standar pelaporan, bukan sebagai alat strategis tata kelola.

Pola Pengungkapan Berdasarkan Indikator GRI

Berdasarkan hasil *content analysis*, indikator pengungkapan yang paling sering diungkapkan adalah pernyataan kebijakan anti korupsi dan komitmen etika perusahaan. Sebaliknya, indikator yang berkaitan dengan evaluasi risiko korupsi dan tindak lanjut atas pelanggaran relatif jarang diungkapkan. Pola ini menunjukkan bahwa pengungkapan anti korupsi pada perbankan syariah masih bersifat normatif dan deklaratif.

Tabel 3. Tingkat Pengungkapan Indikator Anti Korupsi Berdasarkan Kelompok Item GRI.

Kelompok Indikator Pengungkapan Anti Korupsi	Rata-rata Tingkat Pengungkapan
Kebijakan dan komitmen anti korupsi	0,78
Sistem dan mekanisme pengendalian internal	0,56
Pelatihan dan sosialisasi anti korupsi	0,41
Pelaporan dan penanganan insiden korupsi	0,32

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah di Indonesia masih bervariasi antarbank dan antarperiode. Indeks pengungkapan anti korupsi yang diukur berdasarkan indikator Global Reporting Initiative (GRI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,54 dengan nilai minimum 0,27 dan maksimum 0,82. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian bank telah mengungkapkan lebih dari separuh indikator anti korupsi, tingkat pengungkapan tersebut belum merata di seluruh bank dan periode pengamatan. Sebagian besar bank telah mengungkapkan kebijakan dan komitmen anti korupsi secara umum, namun pengungkapan yang berkaitan dengan mekanisme implementasi, pelatihan anti korupsi, serta pelaporan insiden korupsi masih relatif terbatas.

Hasil Pengujian Model dan Pembahasan

Pengaruh Karakteristik Bank terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi anti korupsi. Bank dengan total aset yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank berskala besar menghadapi tekanan *stakeholder* yang lebih kuat serta memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun laporan yang komprehensif. Hasil ini konsisten dengan teori *stakeholder* dan temuan penelitian sebelumnya.

Umur bank juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Bank yang telah beroperasi lebih lama cenderung memiliki pengalaman, jaringan *stakeholder*, dan reputasi yang lebih luas, sehingga mendorong kebutuhan untuk menjaga legitimasi melalui transparansi informasi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa lamanya operasi bank berkaitan dengan kompleksitas hubungan dengan *stakeholder* (Yar & Drew, 2019).

Sebaliknya, profitabilitas menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi anti korupsi. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak selalu terdorong untuk mengungkapkan informasi anti korupsi secara luas, kemungkinan karena fokus manajemen lebih diarahkan pada kinerja keuangan dibandingkan aspek non-keuangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Triani (2018).

Penghargaan CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Bank yang memperoleh *CSR awards* cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap praktik tanggung jawab sosial dan transparansi (Awa et al., 2024). Sementara itu, *customer influence* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, yang menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada dana nasabah tidak selalu diikuti dengan peningkatan pengungkapan anti korupsi. Leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang

mengindikasikan bahwa struktur pendanaan bank tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan pengungkapan anti korupsi.

Pembahasan dalam Perspektif Teoretis

Temuan penelitian ini mendukung teori *stakeholder* manajerial yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi merupakan alat strategis untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Pengaruh positif ukuran dan umur bank menunjukkan bahwa semakin besar dan matang suatu bank, semakin besar pula kebutuhan untuk memperoleh legitimasi melalui pengungkapan informasi anti korupsi.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pengungkapan informasi anti korupsi mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penegakan amanah (Akbar, 2020). Variasi tingkat pengungkapan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam pelaporan masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mencerminkan praktik pencegahan korupsi yang nyata.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori *stakeholder* dan *good corporate governance* dalam menjelaskan praktik pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah. Selain itu, integrasi dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memperkaya kajian CSR berbasis nilai-nilai Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman pengungkapan informasi anti korupsi, khususnya pada aspek implementasi dan evaluasi kebijakan. Bagi regulator, temuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan pedoman pelaporan yang lebih spesifik terkait pengungkapan anti korupsi pada industri perbankan syariah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 11 Bank Umum Syariah selama periode 2012–2016, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan informasi anti korupsi dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik tertentu dari bank. Ukuran bank, umur bank, dan perolehan penghargaan CSR terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan anti korupsi, yang menunjukkan bahwa bank dengan sumber daya lebih besar, pengalaman operasional yang lebih panjang, serta pengakuan eksternal cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, profitabilitas dan customer influence menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan anti korupsi, sedangkan leverage tidak terbukti berpengaruh secara

signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepentingan manajerial dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder kunci berperan penting dalam mendorong pengungkapan informasi anti korupsi. Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder manajerial dan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-shariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan melalui praktik bisnis yang transparan dan bebas dari korupsi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar perbankan syariah di Indonesia meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan informasi anti korupsi sebagai bagian integral dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan prinsip syariah. Regulator dan pemangku kepentingan juga diharapkan dapat mendorong standarisasi pengungkapan anti korupsi yang lebih komprehensif, misalnya dengan mengacu pada indikator Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang relatif terbatas dan jumlah sampel yang hanya mencakup Bank Umum Syariah, sehingga hasilnya perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian, memasukkan Unit Usaha Syariah (UUS), serta mempertimbangkan variabel lain seperti tata kelola syariah, peran dewan pengawas syariah, dan tekanan regulasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pengungkapan informasi anti korupsi di sektor keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah menyediakan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sebagai sumber data penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen pembimbing dan penguji atas arahan, masukan, serta kritik konstruktif yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari karya ilmiah penulis yang disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dan pengembangan keilmuan di bidang perbankan syariah dan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. R. (2020). Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah.
- Awa, H. O., Etim, W., & Ogbonda, E. (2024). Stakeholders, stakeholder theory and Corporate Social Responsibility (CSR). *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40991-024-00094-y>
- Christian, N., & Resnika, R. (2022). Penggunaan Teknik Akuntansi Forensik Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Occupational Fraud: Kajian Literatur. *Jurnal Maneksi*, 11(1), 287-298. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i1.1077>
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., & Lampung, R. I. (2023). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage Dan Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Sub-Sektor Food dan Beverage yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia).
- Koh, K., Li, H., & Tong, Y. H. (2023). Corporate social responsibility (CSR) performance and stakeholder engagement: Evidence from the quantity and quality of CSR disclosures. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 504-517. <https://doi.org/10.1002/csr.2370>
- Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. *International Journal of Finance and Economics*, 26(2), 1871-1885. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1883>
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di Indonesia). Retrieved from <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3394>
- Novita, S., & Fatima, E. (2024). Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021). *Owner*, 8(3), 2981-2993. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2168>
- Ramadhani, N., & Musyarapah. (2024). Tujuan Pendidikan Islam dalam Membentuk Generasi Berakhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 3(2), 78-91. <https://doi.org/10.55080/jpn.v2i2.88>
- Sefriani, & Wartini, S. (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 1-28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1>
- Siregar, M. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Mobile Banking (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan). *Skripsi*.
- Suwandi, A. A., Palma, A., Ismail, C. A., Wulandari, N., Adam, W., Fuad, M., Ristiyana, D., Maghfur, I., Wahab, M., & Rahayu, R. K. (2022). Mengukur Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Laporan Keuangan. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(3).
- Ulya Nadhila Damanik. (2024). Penerapan Muqasid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syari'Ah. *Journal Central Publisher*, 1(8), 844-849. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i8.178>

- Wajdi, F., Seplyana, D., Juliastuti, R., Rumahlewang, E., Fatchiatuzahro, H., Halisa, N. N., Rusmalinda, S., Kristiana, R., Niam, M. F., Purwanti, E. W., Melinasari, S., & Kusumaningrum, R. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7, 2896-2910.
- Yar, M., & Drew, J. (2019). Image-based abuse, non-consensual pornography, revenge porn: A study of criminalization and crime prevention in Australia and England & Wales. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2), 578-594. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709306>